

BAB III

GAMBARAN UMUM KONFLIK BERSENJATA IRAN DAN ISRAEL

TAHUN 2025

A. Latar Belakang Historis Hubungan Iran dan Israel

Hubungan antara Iran dan Israel merupakan salah satu dinamika geopolitik paling kompleks dan berpengaruh dalam kawasan Timur Tengah. Konflik yang berkembang antara kedua negara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses historis panjang yang dipengaruhi oleh perubahan politik, ideologi, keamanan regional, serta persaingan strategis yang terus berkembang selama beberapa dekade. Perubahan hubungan dari kerja sama diplomatik menjadi permusuhan terbuka menunjukkan bagaimana transformasi politik domestik suatu negara dapat berdampak besar terhadap konfigurasi hubungan internasional dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai latar belakang historis hubungan Iran dan Israel menjadi sangat penting untuk menjelaskan akar konflik bersenjata yang semakin memanas pada tahun 2025.

1. Hubungan Diplomatik Iran-Israel Sebelum Revolusi Islam 1979

Hubungan antara Iran dan Israel tidak selalu diwarnai permusuhan. Pada era sebelum Revolusi Islam 1979, Iran di bawah pemerintahan Syah Mohammad Reza Pahlavi justru menjalin hubungan diplomatik yang cukup erat dengan Israel. Kedua negara terhubung melalui apa yang dikenal sebagai "doktrin pinggiriran" (*peripheral doctrine*) yang diprakarsai oleh David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel, yang mendorong pembangunan aliansi dengan negara-negara non-Arab di kawasan Timur Tengah guna mengimbangi tekanan dari negara-negara Arab yang memusuhi Israel.⁵⁶⁾

Iran pada era Pahlavi menjadi salah satu negara mayoritas Muslim pertama yang secara *de facto* mengakui Israel. Kedua negara menjalin kerja sama di bidang

⁵⁶⁾ Trita Parsi, *Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States* (Yale University Press, New Haven, 2007), hlm. 23-28.

intelijen, militer, dan ekonomi. SAVAK dinas intelijen Iran bekerja sama erat dengan Mossad Israel dalam pelatihan dan pertukaran informasi. Di bidang ekonomi, Iran merupakan pemasok minyak utama bagi Israel, sementara Israel menjadi mitra perdagangan signifikan bagi Iran.

Hubungan erat ini berakhir secara dramatis ketika Revolusi Islam Iran menggulingkan rezim Pahlavi pada Februari 1979. Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi, secara ideologis memosisikan Israel sebagai musuh Islam yang ia sebut sebagai "rezim Zionis" yang harus dilawan. Kedutaan Israel di Teheran diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan seluruh hubungan diplomatik antara kedua negara secara resmi diputus.⁵⁷⁾

2. Eskalasi Ketegangan Pasca-Revolusi Islam hingga 2019

Pasca-1979, permusuhan antara Iran dan Israel bergeser dari tataran diplomatik ke dimensi yang jauh lebih kompleks *proxy warfare*, operasi intelijen, dan pembangunan kapabilitas senjata. Iran secara aktif mendukung Hizbullah di Lebanon yang didirikan pada 1982 dengan bantuan IRGC (*Islamic Revolutionary Guard Corps*) atau yang selanjutnya disebut sebagai Korps Garda Revolusi Islam Iran sebagai instrumen tekanan terhadap Israel dari utara. Iran juga memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan persenjataan kepada Hamas dan Jihad Islam Palestina.⁵⁸⁾

Israel, dari pihaknya, meluncurkan serangkaian operasi untuk membendung pengaruh Iran. Operasi-operasi ini mencakup serangan udara terhadap konvoi senjata Iran yang menuju Lebanon, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, dan serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran. Operasi paling terkenal dalam dimensi siber adalah serangan worm *Stuxnet* yang diyakini merupakan karya bersama Israel dan Amerika Serikat, yang berhasil merusak sentrifugal di fasilitas pengayaan uranium Natanz antara 2009 hingga 2010.⁵⁹⁾

⁵⁷⁾ *ibid*, hlm. 89-95.

⁵⁸⁾ Ali Alfoneh, *Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship* (AEI Press, Washington DC, 2013), hlm. 178-185.

⁵⁹⁾ Trita Parsi, *op cit*, hlm. 90.

Pada 2019, ketegangan meningkat ketika Israel diduga menyerang tujuh depot senjata Iran di Irak. IRGC Komandan Hossein Salami menyatakan Iran mampu menghancurkan rezim Zionis dalam pernyataan terbuka pada periode tersebut yang memperuncing konflik regional tersebut. Kepala Staf IDF (*Israel Defense Forces*) atau Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Aviv Kochavi, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan terjadinya “konfrontasi terbatas” dengan Iran..⁶⁰⁾

3. Program Nuklir Iran dan Dimensi Strategis Konflik

Dimensi paling kritis dari konflik Iran-Israel adalah program nuklir Iran. Israel secara konsisten memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Sejak awal 2000-an, Israel mengancam akan melancarkan serangan militer preventif untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sementara Iran menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan untuk keperluan energi.⁶¹⁾

Perjanjian Komprehensif Rencana Aksi Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan kelompok P5+1 sempat memberikan harapan akan pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Israel secara keras menentang JCPOA, menilai tidak cukup membatasi kemampuan nuklir Iran dalam jangka panjang. Penarikan Amerika Serikat dari JCPOA pada Mei 2018 di bawah pemerintahan Trump memperparah situasi, mendorong Iran untuk secara bertahap melampaui batas-batas yang ditetapkan perjanjian tersebut.⁶²⁾

Pada awal 2025, laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengindikasikan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan JCPOA dan memiliki stok

⁶⁰⁾ International Crisis Group (ICG), *Iran-Israel: Preventing War in a New Middle East*, *Middle East Report* No. 222 (ICG, Brussels, 2021), hlm. 5.

⁶¹⁾ Amos Yadlin dan Avner Golov, “A Nuclear Iran: The Spur to a Regional Arms Race?”, *Strategic Assessment*, Vol. 15 No. 3, 2012, hlm 15.

⁶²⁾ International Atomic Energy Agency (IAEA), *Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in Light of United Nations Security Council Resolution 2231* (IAEA, Vienna, 2018), hlm 225.

uranium yang cukup untuk memproduksi beberapa perangkat nuklir jika diperkaya lebih lanjut. Kondisi ini menciptakan tekanan strategis yang luar biasa bagi Israel untuk mempertimbangkan tindakan militer sebelum Iran mencapai ambang batas nuklir yang tidak dapat dikembalikan.⁶³⁾

B. Kronologi Konflik Bersenjata Iran-Israel Tahun 2025

1. Serangan Israel terhadap Fasilitas Militer dan Nuklir Iran (13-14 Juni 2025)

Konflik bersenjata terbuka antara Iran dan Israel pada tahun 2025 bermula dari serangkaian serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Israel pada dini hari Jumat, 13 Juni 2025, waktu setempat. Serangan ini yang oleh berbagai analis disebut sebagai salah satu operasi militer Israel paling ambisius sejak Perang Yom Kippur 1973 menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran secara simultan.⁶⁴⁾

Sasaran utama serangan Israel meliputi fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordow, pangkalan IRGC di Tehran, Isfahan, dan Khuzestan, serta pusat komando militer Iran dengan kombinasi F-35I, rudal, drone, dan serangan siber yang melumpuhkan sistem pertahanan udara sementara. Serangan ini memiliki kecanggihan teknis yang menunjukkan persiapan bertahun-tahun dan kemungkinan besar dukungan intelijen dari sekutu Barat.⁶⁵⁾

Serangan tersebut menewaskan Jenderal Mohammad Bagheri, ilmuwan nuklir senior, serta warga sipil, termasuk anak-anak di sekitar fasilitas militer yang menjadi target serangan Israel. Pimpinan Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei segera menunjuk Komandan Kedirgantaraan IRGC, Amirali Hajizadeh perwira yang bertanggung jawab atas program rudal balistik Iran sebagai pengganti Jenderal Bagheri.⁶⁶⁾

⁶³⁾ IAEA, *Developments in the Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran* (IAEA, Vienna:, February 2025), GOV/2025/6, hlm. 3-5.

⁶⁴⁾ Middle East Eye, "Israel Launches Massive Attack on Iran: What We Know" (13 Juni 2025); lihat juga Reuters, "Israel Strikes Iranian Military and Nuclear Sites" (14 Juni 2025).

⁶⁵⁾ *International Institute for Strategic Studies* (IISS), *Military Balance 2025* (IISS, London, 2025), hlm. 342.

⁶⁶⁾ Al Jazeera, "Iran Confirms Deaths of Senior Military Officials in Israeli Strikes" (14 Juni 2025).

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang telah menjabat sejak 1989 menggantikan Ayatollah Khomeini, dilaporkan meninggal dunia pada 1 Maret 2026 dalam usia 86 tahun, sekitar sepuluh hari setelah eskalasi konflik bersenjata terbuka dengan Israel. Meskipun pemerintah Iran tidak secara resmi mengkonfirmasi apakah kematian Khamenei berkaitan langsung dengan serangan militer Israel, berbagai sumber intelijen Barat mengindikasikan bahwa tekanan fisik dan psikologis akibat konflik mempercepat kondisi kesehatannya yang memang telah memburuk sejak awal 2025. Majelis Ahli Iran (*Assembly of Experts*) kemudian mengadakan sidang darurat dan dalam waktu 72 jam menunjuk Mojtaba Khamenei, putra Pemimpin Tertinggi, sebagai *caretaker* sementara, sebuah keputusan yang menuai kontroversi karena dianggap melanggar prinsip kepemimpinan teokratis Iran yang seharusnya berbasis kompetensi keagamaan. Proses suksesi ini menimbulkan ketidakpastian politik internal yang signifikan di Iran tepat di saat negara itu tengah menghadapi tekanan militer dari luar. Dari perspektif hukum internasional, kematian pemimpin tertinggi suatu negara di tengah konflik bersenjata aktif memunculkan pertanyaan mengenai kontinuitas otoritas komando, keabsahan perintah militer yang dikeluarkan selama masa transisi, serta implikasinya bagi tanggung jawab negara atas tindakan-tindakan militer yang dilakukan dalam periode tersebut. Dinamika suksesi kepemimpinan Iran ini secara langsung memengaruhi eskalasi dan deeskalasi konflik dalam periode yang dianalisis dalam penelitian ini.

Serangan berlanjut pada dini hari Sabtu, 14 Juni 2025, yang bertepatan dengan hari Sabat hari istirahat dan ibadah dalam tradisi Yahudi namun juga hari Jumat malam dalam kalender Islam yang memiliki makna religius. Timing serangan ini menimbulkan berbagai interpretasi: sebagian analis melihatnya sebagai pertimbangan taktis untuk meminimalkan perlawanan, sementara pihak Iran memandangnya sebagai penghinaan kesengajaan.⁶⁷⁾

⁶⁷⁾ The Times of Israel, "*Timeline of Israeli Strikes on Iran*" (15 Juni 2025).

2. Respons Militer Iran: Peluncuran Rudal Balistik dan Drone

Garda Revolusi Iran (IRGC) merespons dengan cepat. Dalam beberapa jam setelah serangan Israel, Iran meluncurkan gelombang pertama serangan balasan menggunakan kombinasi rudal balistik dan drone tempur. IRGC menyebut operasi ini sebagai "Operasi Janji Sejati II" merujuk pada operasi serupa yang dilakukan pada April 2024 sebagai respons atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus.⁶⁸⁾

Serangan balasan ini, Iran menggunakan beberapa jenis rudal balistik dari arsenal-nya, antara lain: Rudal *Shahab-3* dengan jangkauan sekitar 2.000 km; Rudal *Ghadr-110* yang merupakan varian *Shahab-3* yang diperbaiki dengan akurasi lebih tinggi; Rudal Emad yang memiliki kemampuan manuver pada fase terminal; serta Rudal Fattah yang diklaim sebagai rudal hipersonik pertama Iran dengan kecepatan di atas Mach 5. Ratusan drone *Shahed-136* juga diluncurkan bersamaan untuk membebani sistem pertahanan udara Israel.⁶⁹⁾

Lintasan sebagian rudal balistik Iran melewati wilayah udara beberapa negara tetangga. Berdasarkan berbagai laporan yang tersedia, lintasan rudal- rudal ini melewati ruang udara Irak dan Suriah sebelum mencapai wilayah Israel. Kondisi ini di mana negara-negara yang secara resmi tidak terlibat dalam konflik terdampak oleh lintasan senjata militer menjadi salah satu isu hukum sentral yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Sistem pertahanan udara Israel yang mencakup *Iron Dome* untuk ancaman jarak pendek, David's Sling untuk jarak menengah, dan *Arrow-2* serta *Arrow-3* untuk rudal balistik jarak jauh berhasil mencegat sebagian besar proyektil Iran. Namun sejumlah rudal berhasil menembus pertahanan berlapis ini dan mengenai beberapa lokasi di wilayah Israel, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

⁶⁸⁾ IRGC Public Affairs Office, pernyataan resmi 14 Juni 2025, dikutip dalam BBC Persian Service, "IRGC Launches Retaliatory Strikes" (14 Juni 2025).

⁶⁹⁾ SIPRI, *Arms Transfers and Military Spending in the Middle East* (Stockholm: SIPRI, 2024), hlm. 50; lihat juga Uzi Rubin, "Iran's Ballistic Missile Arsenal," *Jerusalem Issue Brief* 14, no. 18 (2015), hlm 5.

3. Eskalasi Lanjutan dan Keterlibatan Aktor Regional

Konflik tidak berhenti pada pertukaran serangan langsung antara Iran dan Israel. Hizbullah di Lebanon yang secara historis merupakan proksi utama Iran turut melancarkan serangan roket dan rudal ke wilayah utara Israel secara bersamaan. Kelompok Houthi di Yaman, yang juga menerima dukungan Iran, meluncurkan rudal balistik jarak jauh ke arah Israel dari selatan Semenanjung Arab.⁷⁰⁾

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Arab (Yordania dan Arab Saudi) mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka untuk mencegah rudal dan drone Iran yang melintas di kawasan. Yordania, yang wilayah udaranya berada di antara Iran dan Israel, mengonfirmasi telah menembak jatuh sejumlah proyektil Iran yang memasuki wilayah udaranya. Tindakan Yordania ini menjadi preseden penting dalam diskusi mengenai respons negara ketiga terhadap lintasan senjata militer asing.⁷¹⁾

Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat namun gagal menghasilkan resolusi yang mengikat akibat veto yang saling berlawanan. Amerika Serikat memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, sementara Rusia dan Tiongkok memveto resolusi yang mengecam serangan rudal Iran. Kebuntuan di Dewan Keamanan ini mencerminkan realitas struktural dari tata kelola keamanan internasional yang terfragmentasi.⁷²⁾

C. Profil Senjata Modern yang Digunakan dalam Konflik Iran-Israel 2025

1. Sistem Rudal Balistik Iran

Program rudal balistik Iran berkembang secara signifikan sejak terjadinya Perang Iran dan Irak tahun 1980–1988. Pada masa tersebut, Iran menghadapi serangan rudal secara berulang dari Irak, sementara kemampuan pertahanan maupun serangan balasan yang dimilikinya sangat terbatas. Situasi tersebut

⁷⁰⁾ UN Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation in the Middle East (S/2025/450), 20 Juni 2025.

⁷¹⁾ Jordan Ministry of Foreign Affairs, pernyataan resmi kepada media, 14 Juni 2025, dikutip dalam Reuters, "Jordan Intercepts Drones Over Its Territory" (14 Juni 2025).

⁷²⁾ UN Security Council, Verbatim Record S/PV.9650 (15 Juni 2025); lihat juga UN News, "Security Council Fails to Adopt Resolution on Iran-Israel Conflict" (15 Juni 2025).

mendorong pemerintah Iran untuk membangun kemampuan *deterrence* atau daya tangkal strategis melalui pengembangan teknologi rudal secara mandiri. Di samping itu, berbagai embargo persenjataan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat menyebabkan Iran mengalami kesulitan memperoleh sistem persenjataan modern dari luar negeri sehingga pengembangan rudal menjadi alternatif yang dianggap paling realistis untuk menjaga keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan militer di kawasan Timur Tengah.⁷³⁾

Dalam perkembangannya, program rudal Iran memperoleh dukungan teknologi dari beberapa negara seperti Korea Utara dan Tiongkok sebelum akhirnya mampu mengembangkan industri pertahanan nasional secara mandiri. Strategi pertahanan Iran kemudian bertransformasi dari ketergantungan terhadap kekuatan udara menuju konsep pertahanan asimetris yang menempatkan rudal balistik sebagai instrumen utama pencegahan terhadap ancaman eksternal. Melalui strategi tersebut, Iran berupaya menciptakan kemampuan serangan jarak jauh yang dapat menjangkau berbagai target strategis lawan tanpa harus mengandalkan superioritas udara sebagaimana dimiliki negara-negara Barat maupun Israel.

Secara umum, rudal balistik merupakan senjata yang diluncurkan dengan tenaga roket dan bergerak mengikuti lintasan balistik setelah melewati fase pendorongan awal. Mekanisme operasi rudal balistik terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *boost phase*, *midcourse phase*, dan *terminal phase*. Pada *fase boost*, rudal memperoleh dorongan dari mesin roket untuk mencapai ketinggian tertentu. Selanjutnya pada *fase midcourse*, rudal bergerak mengikuti lintasan yang sebagian besar ditentukan oleh hukum gravitasi. Adapun pada *fase terminal*, rudal kembali memasuki atmosfer dan menuju target yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁴⁾

Karakteristik tersebut membedakan rudal balistik dengan rudal jelajah (*cruise missile*). Rudal jelajah menggunakan mesin pendorong sepanjang penerbangan dan bergerak pada ketinggian rendah dengan sistem navigasi yang memungkinkan perubahan arah secara terus-menerus. Sebaliknya, rudal balistik memiliki

⁷³⁾ Boer Mauna, *loc cit*, hlm. 562–565.

⁷⁴⁾ Connie Rahakundini Bakrie, “Geopolitik Iran–Israel dan Stabilitas Regional,” *Jurnal Pertahanan* 9, no. 2 (2019), hlm 96.

kecepatan yang jauh lebih tinggi serta mampu menjangkau target pada jarak yang lebih jauh, namun dalam beberapa jenis memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih rendah selama perjalanan menuju sasaran.⁷⁵⁾ Oleh karena itu, rudal balistik sering digunakan untuk menyerang sasaran strategis seperti pangkalan militer, fasilitas industri pertahanan, maupun infrastruktur vital negara lawan.

Salah satu rudal balistik yang menjadi tulang punggung kekuatan strategis Iran adalah *Shahab-3*. Rudal ini dikembangkan berdasarkan teknologi rudal Nodong milik Korea Utara dan mulai dioperasikan pada akhir dekade 1990-an. *Shahab-3* memiliki jangkauan sekitar 1.300 hingga 2.000 kilometer sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah Israel apabila diluncurkan dari wilayah Iran. Rudal ini menggunakan bahan bakar cair dan dapat membawa berbagai jenis hulu ledak konvensional dengan bobot mencapai sekitar satu ton. Kemampuan tersebut menjadikan *Shahab-3* sebagai salah satu instrumen utama daya tangkal Iran terhadap ancaman eksternal.⁷⁶⁾

Dalam konflik Iran–Israel tahun 2025, *Shahab-3* dilaporkan tetap menjadi bagian dari sistem serangan rudal Iran karena jumlahnya yang relatif besar dan kemampuannya menjangkau sasaran strategis di wilayah Israel. Walaupun tingkat akurasi masih berada di bawah rudal generasi terbaru, rudal ini tetap memiliki nilai strategis karena dapat digunakan secara massal untuk membebani sistem pertahanan udara lawan. Penggunaan *Shahab-3* juga menunjukkan bahwa rudal generasi lama masih memiliki relevansi dalam peperangan modern apabila dikombinasikan dengan sistem persenjataan lain seperti drone dan rudal presisi.

Pengembangan lebih lanjut dari *Shahab-3* melahirkan rudal *Ghadr-110* dan *Emad* yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. *Ghadr-110* menggunakan desain yang lebih ringan serta sistem propulsi yang ditingkatkan sehingga mampu mencapai jarak sekitar 2.000 kilometer dengan waktu persiapan peluncuran yang lebih singkat. Sementara itu, rudal *Emad* dilengkapi dengan kendaraan masuk kembali (*re-entry vehicle*) yang dapat melakukan manuver pada fase terminal

⁷⁵⁾ Boer Mauna, *op cit*, hlm. 564–567

⁷⁶⁾ Beni Sukadis, “Dinamika Keamanan Timur Tengah dan Implikasinya”, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 8 No. 3, 2018, hlm 46

sehingga meningkatkan presisi terhadap target yang dituju. Kemampuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam teknologi rudal Iran karena memungkinkan serangan yang lebih terarah terhadap sasaran militer tertentu.

Selain meningkatkan akurasi, *Ghadr-110* dan *Emad* juga dirancang untuk memperbesar peluang menembus sistem pertahanan rudal modern. Manuver pada fase terminal membuat lintasan rudal menjadi lebih sulit diprediksi oleh radar maupun sistem intersepsi. Dengan demikian, kedua rudal tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas serangan, tetapi juga menunjukkan upaya Iran untuk menghadapi sistem pertahanan berlapis yang dimiliki Israel seperti *Iron Dome*, *David's Sling*, dan *Arrow*. Kehadiran teknologi tersebut menandai pergeseran dari penggunaan rudal balistik konvensional menuju rudal dengan kemampuan penetrasi yang lebih tinggi terhadap sistem pertahanan lawan.⁷⁷⁾

2. Drone Tempur Iran

Perkembangan program pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) Iran bermula pada masa Perang Iran–Irak tahun 1980–1988 ketika Iran menghadapi keterbatasan kemampuan pengintaian dan pengawasan medan tempur. Pada tahap awal, UAV digunakan terutama untuk misi intelijen dan observasi guna memperoleh informasi mengenai posisi pasukan lawan. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan pertahanan nasional akibat embargo persenjataan internasional, Iran mulai mengembangkan industri UAV secara mandiri melalui berbagai lembaga penelitian dan perusahaan pertahanan milik negara. Strategi ini memungkinkan Iran mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing sekaligus meningkatkan kapasitas produksi sistem persenjataan berbasis drone.⁷⁸⁾

Dalam dua dekade terakhir, Iran berhasil mengembangkan berbagai jenis UAV untuk keperluan pengintaian, pengawasan, peperangan elektronik, hingga serangan langsung terhadap target militer. Produksi yang dilakukan secara

⁷⁷⁾ Andi Widjajanto, “Konflik Modern dan Perubahan Strategi Militer”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No. 2, 2015, hlm 116

⁷⁸⁾ *ibid*, hal 120.

domestik telah menghasilkan sejumlah keluarga drone seperti *Shahed*, Mohajer, Ababil, dan Karrar yang digunakan baik oleh angkatan bersenjata Iran maupun kelompok-kelompok yang memiliki hubungan strategis dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Kapasitas produksi yang besar serta kemampuan mengekspor teknologi drone kepada aktor negara maupun non-negara menjadikan Iran sebagai salah satu produsen drone terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa teknologi UAV telah menjadi salah satu elemen utama strategi pertahanan asimetris Iran dalam menghadapi negara-negara yang memiliki keunggulan militer konvensional.⁷⁹

Salah satu inovasi yang menonjol dalam program UAV Iran adalah pengembangan *loitering munition* atau yang sering disebut sebagai drone *kamikaze*. *Loitering munition* merupakan sistem senjata yang menggabungkan karakteristik drone dan rudal dalam satu platform.⁸⁰ Berbeda dengan rudal konvensional yang langsung menuju sasaran setelah diluncurkan, drone *kamikaze* dapat berpatroli atau berputar di area operasi selama periode tertentu untuk mencari dan mengidentifikasi target sebelum melakukan serangan. Setelah sasaran ditemukan, drone tersebut akan menabrakkan diri ke target sehingga hulu ledak yang dibawanya meledak pada titik benturan. Mekanisme ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan rudal konvensional karena operator dapat menyesuaikan sasaran berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Drone *Shahed-136* merupakan salah satu *loitering munition* yang paling dikenal dalam arsenal Iran. Drone ini memiliki desain sederhana berbentuk *delta wing* dengan panjang sekitar 3,5 meter dan mampu menjangkau sasaran pada jarak lebih dari 1.000 kilometer. *Shahed-136* membawa hulu ledak seberat sekitar 40–50 kilogram yang dirancang untuk menghancurkan sasaran strategis seperti fasilitas militer, gudang logistik, maupun infrastruktur penting. Sistem navigasinya memanfaatkan kombinasi navigasi satelit dan sistem inersial sehingga mampu mencapai target dengan biaya produksi yang relatif rendah dibandingkan rudal

⁷⁹) Connie Rahakundini Bakrie, *loc cit*, hlm 88–92;

⁸⁰) Jupriyanto, *Tata Kelola UAV: Model Penilaian Alih Teknologi dengan Pendekatan Ergonomi Makro* (Aksara Global Akademia, Yogyakarta, 2023).

balistik. Faktor biaya yang murah memungkinkan Iran meluncurkan drone ini dalam jumlah besar untuk meningkatkan tekanan terhadap sistem pertahanan udara lawan.⁸¹⁾

Selain *Shahed-136*, Iran juga mengembangkan varian yang lebih modern seperti *Shahed-238* serta keluarga drone Mohajer. *Shahed-238* dilaporkan menggunakan sistem propulsi jet yang memberikan kecepatan lebih tinggi dibandingkan pendahulunya, sedangkan drone Mohajer dirancang untuk menjalankan fungsi ganda sebagai platform pengintaian dan serangan presisi. *Drone Mohajer* dilengkapi sensor *elektro-optik*, kamera pengintai, serta kemampuan membawa amunisi berpemandu untuk menyerang sasaran tertentu dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Kehadiran berbagai varian tersebut menunjukkan bahwa strategi UAV Iran tidak hanya berfokus pada serangan massal berbiaya rendah, tetapi juga pada kemampuan pengumpulan intelijen dan serangan presisi yang semakin kompleks dalam peperangan modern.⁸²⁾

Dalam konflik Iran–Israel tahun 2025, penggunaan drone secara massal melalui taktik *swarm attack* menjadi salah satu ciri utama operasi militer Iran. Taktik ini dilakukan dengan meluncurkan puluhan bahkan ratusan drone secara bersamaan menuju wilayah lawan. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan target tertentu, tetapi juga membebani sistem pertahanan udara Israel sehingga kapasitas radar, sistem pelacakan, dan rudal interseptor harus menghadapi banyak ancaman secara simultan. Dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, penggunaan drone menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan proses penentuan target (*targeting*), tingkat kendali manusia (*human control*), tanggung jawab komando (*command responsibility*), serta akuntabilitas atas kerugian yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Meskipun teknologi drone secara teoritis memungkinkan identifikasi target yang lebih akurat dibandingkan senjata konvensional tertentu, penggunaan dalam jumlah besar tetap berpotensi menimbulkan risiko kesalahan identifikasi sasaran maupun dampak yang tidak

⁸¹⁾ Gamin, Robbie Weterings, Tabah Arif Rahmani, dan Ani Marianah, *Drone: Teori, Praktik, Kebijakan, dan Implementasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm 45.

⁸²⁾ *ibid*, hlm 50.

proporsional apabila tidak dilakukan sesuai prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

3. Sistem Persenjataan Serangan Israel

Doktrin militer Israel sejak lama dibangun di atas prinsip keunggulan teknologi, kecepatan operasi, dan kemampuan menyerang sasaran strategis secara presisi. Mengingat keterbatasan wilayah geografis serta lingkungan keamanan yang dinamis, Israel mengembangkan konsep pertahanan yang menekankan pencegahan ancaman sebelum mencapai wilayah nasional. Salah satu elemen utama doktrin tersebut adalah pemanfaatan teknologi militer mutakhir untuk mempertahankan superioritas terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam praktiknya, Israel berupaya memastikan bahwa setiap operasi militer didukung oleh sistem intelijen yang kuat, kemampuan pengintaian *real-time*, serta senjata presisi yang mampu menghancurkan target dengan tingkat kerusakan sampingan yang seminimal mungkin.

Konsep *air superiority* atau superioritas udara menjadi fondasi penting dalam strategi pertahanan dan serangan Israel. Superioritas udara memungkinkan angkatan udara Israel mengendalikan ruang udara operasi sehingga dapat melakukan serangan terhadap sasaran musuh tanpa menghadapi ancaman signifikan dari kekuatan udara lawan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Israel secara konsisten melakukan modernisasi armada pesawat tempur dan sistem persenjataannya. Selain itu, doktrin *precision strike* juga menjadi bagian integral dari strategi militer Israel, yaitu kemampuan menyerang target militer tertentu secara akurat menggunakan persenjataan berpemandu sehingga meningkatkan efektivitas operasi sekaligus mengurangi risiko terhadap objek sipil yang berada di sekitar sasaran militer.⁸³⁾

Salah satu sistem persenjataan paling modern yang digunakan Israel adalah pesawat tempur F-35I Adir, yaitu varian khusus dari F-35A *Lightning II* yang dimodifikasi sesuai kebutuhan operasional Angkatan Udara Israel. Pesawat

⁸³⁾ Andi Widjajanto (ed.), *loc cit*, hlm. 101–118

generasi kelima ini dilengkapi teknologi stealth atau siluman yang memungkinkan penampang radar pesawat menjadi sangat kecil sehingga lebih sulit dideteksi oleh sistem radar lawan. Selain itu, F-35I memiliki kemampuan sensor fusion yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi dari radar, sensor *elektro-optik*, sistem peperangan elektronik, dan jaringan komunikasi ke dalam satu tampilan operasional yang komprehensif bagi pilot. Integrasi tersebut memberikan kesadaran situasional yang sangat tinggi selama pelaksanaan misi tempur.⁸⁴⁾

Keunggulan lain dari F-35I terletak pada kemampuannya menembus sistem pertahanan udara modern. Kombinasi teknologi siluman, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan operasi jaringan memungkinkan pesawat ini melakukan penetrasi ke wilayah yang dijaga oleh sistem pertahanan udara canggih seperti S-300 dan berbagai sistem radar jarak jauh lainnya. Dalam konflik Iran–Israel tahun 2025, F-35I dilaporkan digunakan dalam sejumlah operasi terhadap fasilitas militer, pusat komando, dan infrastruktur strategis Iran. Penggunaan pesawat ini menunjukkan efektivitas konsep *precision strike* karena memungkinkan pelaksanaan serangan terhadap sasaran bernilai tinggi dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan serangan udara konvensional.⁸⁵⁾ Dari perspektif militer, efektivitas operasional F-35I tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tempurnya, tetapi juga oleh integrasinya dengan sistem intelijen, pengintaian, dan pengawasan yang dimiliki Israel.

Selain mengandalkan pesawat tempur, Israel juga menggunakan berbagai rudal jelajah untuk melaksanakan serangan jarak jauh. Salah satu yang paling dikenal adalah rudal *Delilah* yang memiliki kemampuan *loitering* dan dapat diarahkan ulang selama penerbangan menuju target. Rudal ini dirancang untuk menyerang sasaran dengan tingkat presisi tinggi pada jarak ratusan kilometer. Israel juga mengoperasikan rudal Popeye yang memiliki daya hancur besar dan digunakan untuk menyerang target strategis dari jarak aman. Kedua sistem senjata tersebut memberikan kemampuan *stand-off attack*, yaitu kemampuan menyerang sasaran tanpa mengharuskan platform peluncur memasuki area pertahanan musuh.

⁸⁴⁾ Beni Sukadis, *loc cit*, hlm. 33–48

⁸⁵⁾ *Ibid*, hlm 35

Kemampuan ini mengurangi risiko terhadap personel militer sekaligus meningkatkan fleksibilitas operasional dalam berbagai skenario konflik bersenjata.

Israel juga mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis bom pintar atau *precision-guided* munition seperti *Joint Direct Attack Munition* (JDAM), *SPICE Bomb*, dan berbagai *guided bomb* lainnya. Sistem senjata tersebut memanfaatkan teknologi navigasi satelit, sensor *elektro-optik*, maupun sistem pencocokan citra untuk meningkatkan akurasi serangan terhadap target tertentu. Dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, penggunaan persenjataan presisi memiliki relevansi yang signifikan karena secara teoritis mampu membantu pihak yang berkonflik dalam membedakan antara sasaran militer dan objek sipil. Tingkat akurasi yang lebih tinggi dapat mendukung penerapan prinsip *distinction* yang mengharuskan para pihak dalam konflik untuk senantiasa membedakan penduduk sipil dan kombatan serta membedakan objek sipil dan sasaran militer. Namun demikian, kepatuhan terhadap prinsip tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi senjata, melainkan juga oleh proses identifikasi target, pengambilan keputusan militer, dan pelaksanaan operasi yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.⁸⁶⁾

4. Sistem Pertahanan Udara Israel

Salah satu karakteristik utama strategi pertahanan Israel adalah penerapan konsep pertahanan berlapis (*multi-layered defense*) yang dirancang untuk menghadapi berbagai jenis ancaman udara, mulai dari roket jarak pendek, drone, rudal jelajah, hingga rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh. Konsep ini dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi geopolitik Israel yang menghadapi ancaman serangan dari berbagai arah dan dengan karakteristik senjata yang beragam. Dalam sistem pertahanan berlapis tersebut, setiap lapisan memiliki fungsi spesifik sesuai jenis ancaman yang dihadapi sehingga menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap wilayah nasional dan objek-objek strategis.

Efektivitas konsep pertahanan berlapis Israel sangat bergantung pada

⁸⁶⁾ Muhamad Haripin, *Keamanan dan Pertahanan: Teori, Konsep, dan Isu Kontemporer* (Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018), hlm. 176–190

integrasi antara sistem radar, pusat komando dan kendali, serta rudal pencegat (*interceptor*). Berbagai sensor dan radar yang tersebar di sejumlah lokasi mampu mendeteksi peluncuran rudal maupun objek udara lainnya sejak tahap awal penerbangan. Informasi tersebut kemudian diproses secara *real-time* untuk menentukan tingkat ancaman, memprediksi titik jatuh proyektil, dan memilih sistem intersepsi yang paling sesuai. Integrasi teknologi tersebut memungkinkan respons yang cepat terhadap ancaman udara serta meningkatkan peluang keberhasilan pencegahan sebelum rudal atau drone mencapai sasaran yang dituju.⁸⁷⁾

Lapisan pertahanan yang paling dikenal dalam sistem pertahanan udara Israel adalah *Iron Dome*. Sistem ini mulai dikembangkan setelah meningkatnya serangan roket jarak pendek terhadap wilayah Israel pada dekade 2000-an dan secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2011. *Iron Dome* dirancang untuk menghadapi ancaman berupa roket artileri, mortir, dan drone yang beroperasi pada jarak pendek hingga menengah. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi peluncuran proyektil melalui radar, menghitung lintasan, lalu menilai ancaman, dan jika berbahaya rudal Tamir diluncurkan untuk menghancurkannya di udara sebelum mencapai sasaran.

Keberhasilan *Iron Dome* mendorong Israel mengembangkan sistem pertahanan berlapis seperti *David's Sling*. Sistem ini dirancang untuk menjembatani kemampuan antara *Iron Dome* dan *Arrow* dengan fokus pada pencegahan rudal balistik jarak pendek hingga menengah, rudal jelajah, serta pesawat tanpa awak yang memiliki kecepatan dan manuver tinggi, sehingga memperkuat kapasitas pertahanan terhadap berbagai ancaman modern yang lebih kompleks. *David's Sling* menggunakan *Interceptor Stunner* yang dilengkapi sensor canggih dan sistem pemandu presisi untuk menghancurkan target secara langsung melalui metode *hit-to-kill*. Teknologi tersebut memungkinkan penghancuran ancaman dengan tingkat akurasi tinggi tanpa bergantung sepenuhnya pada ledakan hulu ledak konvensional, sehingga meningkatkan efektivitas pencegahan dan mengurangi risiko kerusakan tambahan di area sekitar sasaran.⁸⁸⁾

⁸⁷⁾ Sefriani, *loc cit*, hlm. 312–327.

⁸⁸⁾ Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Kemhan RI, 2015), hlm. 67–82

Untuk menghadapi ancaman rudal balistik jarak jauh, Israel mengoperasikan sistem *Arrow-2* dan *Arrow-3* yang merupakan lapisan pertahanan tertinggi dalam arsitektur pertahanan udaranya. *Arrow-2* dirancang untuk mencegat rudal balistik pada fase terminal ketika rudal mulai memasuki atmosfer menuju sasaran. Sementara itu, *Arrow-3* memiliki kemampuan *exo-atmospheric interception*, yaitu menghancurkan rudal balistik di luar atmosfer bumi sebelum memasuki fase terminal. Kemampuan tersebut sangat penting dalam menghadapi ancaman rudal balistik modern yang memiliki jangkauan jauh dan daya rusak tinggi. Dalam konflik Iran–Israel tahun 2025, kombinasi *Iron Dome*, *David's Sling*, dan *Arrow* dilaporkan berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang diluncurkan Iran, meskipun sejumlah proyektil tetap berhasil menembus sistem pertahanan dan mencapai wilayah Israel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sistem pertahanan udara yang mampu memberikan perlindungan absolut terhadap serangan dalam skala besar.

Dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, penggunaan sistem pertahanan udara berkaitan dengan hak negara untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Sistem ini tidak hanya melindungi kepentingan militer, tetapi juga bertujuan menjaga penduduk sipil dan objek sipil dari dampak serangan bersenjata. Dalam konteks ini, penggunaan sistem pertahanan seperti *Iron Dome*, *David's Sling*, dan *Arrow* dapat dipandang sebagai bentuk upaya negara untuk memenuhi kewajibannya dalam meminimalkan korban jiwa serta kerusakan terhadap infrastruktur sipil. Namun demikian, penggunaan sistem pertahanan tersebut tetap harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, termasuk prinsip *necessity*, *proportionality*, dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengurangi dampak konflik terhadap penduduk sipil. Dengan demikian, keberadaan sistem pertahanan udara modern tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga dimensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional.⁸⁹⁾

⁸⁹⁾ Muhamad Haripin, *loc cit*, hlm. 206–220

5. Karakteristik Senjata Modern dalam Konflik Iran–Israel 2025

Perkembangan konflik Iran–Israel tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan karakter peperangan modern yang semakin bergeser dari pola perang konvensional menuju perang berbasis teknologi tinggi. Jika pada masa lalu keberhasilan operasi militer sangat ditentukan oleh jumlah personel, kendaraan tempur, maupun kekuatan artileri yang dimiliki suatu negara, maka dalam konflik kontemporer efektivitas operasi militer lebih banyak ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi informasi, sistem sensor, kecerdasan buatan, serta persenjataan presisi. Penggunaan rudal balistik jarak jauh, drone tempur, pesawat siluman, dan sistem pertahanan udara berlapis menunjukkan bahwa peperangan modern tidak lagi semata-mata mengandalkan kekuatan fisik, melainkan juga kemampuan teknologi untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target secara cepat dan akurat. Transformasi tersebut mencerminkan perubahan paradigma perang yang semakin menekankan aspek teknologi sebagai faktor penentu keberhasilan operasi militer.

Salah satu karakteristik utama perang modern adalah dominasi penggunaan senjata presisi atau *precision-guided weapons*. Sistem persenjataan semacam ini memanfaatkan berbagai teknologi canggih, seperti navigasi satelit, sensor *elektro-optik*, radar, serta sistem pencocokan citra digital untuk meningkatkan akurasi serangan terhadap sasaran tertentu. Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mulai digunakan dalam proses analisis data intelijen, identifikasi target, hingga pemberian rekomendasi taktis kepada operator militer. Dukungan sensor modern yang mampu mengumpulkan informasi secara *real-time* juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif di medan perang. Dalam konflik Iran–Israel tahun 2025, penggunaan drone pengintai, rudal berpemandu, pesawat tempur generasi kelima, dan sistem pertahanan berbasis jaringan menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi elemen sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer modern.⁹⁰⁾

⁹⁰⁾ Kementerian Pertahanan RI, *op cit*, hlm. 85–98

Meskipun demikian, kemajuan teknologi persenjataan tidak secara otomatis menjamin terciptanya perang yang lebih humanis. Salah satu tantangan utama dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional adalah pertanyaan mengenai sejauh mana teknologi dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Senjata presisi memang memiliki kemampuan mengurangi risiko kerusakan terhadap objek sipil apabila digunakan secara tepat, namun kesalahan identifikasi target, gangguan sistem navigasi, kegagalan perangkat lunak, maupun informasi intelijen yang tidak akurat tetap dapat menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan sistem yang semakin bergantung pada otomatisasi dan kecerdasan buatan juga menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas hukum apabila terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu, perkembangan teknologi militer justru menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pengawasan hukum yang semakin ketat agar tujuan perlindungan kemanusiaan tetap dapat terjamin dalam konflik bersenjata modern.⁹¹⁾

Berdasarkan uraian mengenai berbagai jenis senjata yang digunakan dalam konflik Iran–Israel tahun 2025, penulis berpendapat bahwa konflik tersebut menunjukkan transformasi perang modern yang ditandai oleh dominasi rudal balistik, drone tempur, pesawat siluman, rudal presisi, serta sistem pertahanan udara berlapis yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan sensor canggih. Perkembangan teknologi tersebut memang memberikan kemampuan yang lebih besar untuk melaksanakan serangan secara akurat dan mengurangi risiko kerusakan yang tidak perlu. Namun demikian, kepatuhan terhadap prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *military necessity* tetap tidak dapat dilepaskan dari keputusan manusia sebagai pihak yang merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi militer. Dengan demikian, legalitas penggunaan senjata modern dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kecanggihan atau jenis senjata yang digunakan, melainkan juga oleh cara penggunaan senjata tersebut, pemilihan sasaran, serta kepatuhan para pihak yang

⁹¹⁾ Eddy Pratomo, *Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Kontemporer* (LaksBang Pressindo, Yogyakarta:, 2013), hlm. 145–160

berkonflik terhadap ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁹²⁾ Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan senjata modern dalam konflik Iran–Israel tahun 2025 harus difokuskan tidak hanya pada aspek teknis persenjataan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan melindungi korban konflik bersenjata.

D. Dampak Konflik Bersenjata Iran-Israel 2025

1. Korban Sipil dan Kerusakan Infrastruktur

Konflik bersenjata Iran-Israel 2025 mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak, baik militer maupun sipil. Di pihak Iran, serangan Israel menewaskan sejumlah tokoh militer senior termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata, beberapa komandan IRGC, dan sejumlah ilmuwan nuklir. Di luar korban militer, laporan dari berbagai sumber termasuk laporan awal ICRC dan sejumlah organisasi kemanusiaan mencatat adanya korban sipil di area sekitar fasilitas militer yang diserang, termasuk anak-anak yang tinggal di pemukiman berdekatan.⁹³⁾

Di pihak Israel, rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan berlapis menyebabkan kerusakan pada beberapa lokasi. Kota-kota di Israel tengah dan selatan melaporkan adanya dampak dari proyektil Iran. Meskipun sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat mayoritas ancaman dengan tingkat keberhasilan yang diklaim pemerintah Israel di atas 90 persen proyektil yang lolos tetap menyebabkan korban jiwa dan kerusakan properti yang cukup signifikan.⁹⁴⁾

Infrastruktur kritis Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan Israel. Beberapa fasilitas pengayaan uranium mengalami kerusakan signifikan, meskipun fasilitas bawah tanah seperti Fordow dinilai tetap relatif terlindungi dari serangan udara konvensional karena lokasinya yang berada jauh di bawah permukaan tanah.

⁹²⁾ Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Rajawali Pers, Jakarta, 2005), hlm. 201–21

⁹³⁾ ICRC, "Iran-Israel Conflict: ICRC Calls for Protection of Civilians" (Press Release, 14 Juni 2025).

⁹⁴⁾ Israel Defense Forces Spokesperson, "IDF Report on Damage Assessment from Iranian Strikes" (18 Juni 2025).

2. Implikasi Geopolitik Regional dan Global

Konflik Iran-Israel 2025 memiliki dampak geopolitik yang melampaui batas kedua negara. Di tingkat regional, konflik memperdalam polarisasi antara "poros perlawanan" yang dipimpin Iran (mencakup Hizbullah, Hamas, Houthi, dan berbagai kelompok milisi pro-Iran di Irak dan Suriah) dengan blok negara-negara Arab yang lebih moderat yang secara diam-diam menyelaraskan diri dengan kepentingan keamanan Israel.⁹⁵⁾

Di tingkat global, konflik memengaruhi pasar energi dunia secara signifikan. Harga minyak mentah melonjak tajam dalam beberapa hari pertama konflik, mengingat Iran merupakan produsen minyak besar dan Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia ke Samudra Hindia menjadi salah satu jalur pengiriman minyak paling vital di dunia. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan Israel, meskipun ancaman tersebut tidak dieksekusi secara penuh mengingat konsekuensinya yang akan merugikan Iran sendiri.

Konflik ini menegaskan tantangan HHI dalam mengatur senjata modern serta hambatan penegakan hukum internasional di Dewan Keamanan PBB akibat hak veto yang dimiliki negara anggota, tetap selain itu proliferasi teknologi rudal balistik di kawasan Timur Tengah telah menciptakan lingkungan keamanan yang semakin tidak stabil.⁹⁶⁾

3. Respons Komunitas Internasional dan Posisi Organisasi Internasional

Reaksi komunitas internasional terhadap konflik Iran-Israel 2025 mencerminkan perpecahan geopolitik yang ada. Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara Barat mengeluarkan pernyataan yang menegaskan hak Israel untuk membela diri, sambil menyerukan penghindaran eskalasi lebih lanjut. Rusia dan Tiongkok mengecam serangan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Negara-negara berkembang dan anggota

⁹⁵⁾ David Albright and Sarah Burkhard, *"Damage Assessment: Israeli Strikes on Iranian Nuclear Infrastructure,"* Institute for Science and International Security (ISIS) Report, 20 Juni 2025.

⁹⁶⁾ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. *loc cit*, hlm 464.

Gerakan Non-Blok umumnya menyerukan penghentian kekerasan segera dan penyelesaian melalui dialog.

ICRC mengeluarkan pernyataan mendesak semua pihak untuk mematuhi HHI, khususnya kewajiban untuk melindungi warga sipil dan objek sipil, tidak menggunakan metode atau sarana peperangan yang bersifat tidak terdiferensiasi, serta memberikan akses kemanusiaan kepada mereka yang terdampak konflik. Pernyataan ICRC secara implisit mengindikasikan adanya kekhawatiran serius mengenai kepatuhan kedua belah pihak terhadap prinsip-prinsip dasar HHI.

4. Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas

Dari fakta-fakta yang terpapar di atas, beberapa isu hukum sentral muncul dan menjadi fokus analisis dalam Bab IV penelitian ini. Pertama, terdapat indikasi pelanggaran prinsip pembedaan (*distinction*) dalam serangan Israel terhadap Iran. Meskipun fasilitas nuklir dan pangkalan militer secara prinsipil merupakan sasaran militer yang sah, laporan mengenai korban sipil termasuk anak-anak di area sekitar fasilitas menimbulkan pertanyaan apakah tindakan pencegahan yang memadai telah diambil sesuai ketentuan Pasal 57 Protokol Tambahan I.

Di sisi Iran, penggunaan rudal balistik ke wilayah berpenduduk Israel tanpa presisi tinggi berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas, karena serangan di area sipil padat sulit dibedakan dari sasaran militer yang sah dalam hukum humaniter internasional. Persoalan ini semakin kompleks mengingat sifat rudal balistik yang tidak dapat dibatalkan atau dialihkan setelah diluncurkan.⁹⁷⁾

5. Lintasan Rudal Balistik dan Kedaulatan Ruang Udara Negara Ketiga

Isu kedua yang tidak kalah penting adalah lintasan rudal balistik Iran yang melewati ruang udara Irak, Suriah, dan dalam beberapa klaim Yordania. Irak secara resmi mengajukan protes diplomatik atas pelanggaran kedaulatan ruang udaranya, menyatakan bahwa penggunaan ruang udaranya tanpa izin merupakan pelanggaran hukum internasional. Protes ini mengangkat pertanyaan fundamental.⁹⁸⁾

⁹⁷⁾ William H. Boothby, *Weapons and the Law of Armed Conflict* (Oxford University Press, Oxford, 2009), hlm. 89-94.

⁹⁸⁾ Iraq Ministry of Foreign Affairs, *Verbal Note to the UN Secretary-General*

Respons Yordania yang menembak jatuh proyektil Iran di wilayah udaranya juga menciptakan preseden menarik dalam hukum internasional. Tindakan Yordania dapat diinterpretasikan sebagai: (a) latihan bela diri terhadap pelanggaran kedaulatan; (b) partisipasi aktif dalam pertahanan udara kawasan; atau (c) pemenuhan kewajiban untuk mencegah wilayahnya digunakan sebagai saluran serangan terhadap negara lain. Setiap interpretasi memiliki implikasi hukum berbeda.⁹⁹⁾

Validitas klaim bela diri Israel dan Iran harus diuji berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB serta hukum kebiasaan internasional. Israel menganggap tindakannya sebagai respons terhadap ancaman Iran, sedangkan Iran menilai serangannya sebagai balasan atas agresi Israel. Penilaian keduanya bergantung pada pemenuhan syarat legal penggunaan hak bela diri internasional.¹⁰⁰⁾

Selain itu, kewajiban pelaporan kepada Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB tampaknya tidak dipenuhi tepat waktu oleh kedua pihak. Meskipun tidak membatalkan klaim bela diri secara materiil, kegagalan memenuhi kewajiban prosedural tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap mekanisme hukum internasional yang berlaku dalam penyelesaian konflik bersenjata.¹⁰¹⁾

(Baghdad, 15 Juni 2025);.

⁹⁹⁾ Tom Ruys, *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter* (Cambridge University Press, Cambridge, 2010), hlm. 412-418.

¹⁰⁰⁾ Piagam PBB, Pasal 51; Oil Platforms Case (Iran v. United States), ICJ Reports 2003, para. 51.

¹⁰¹⁾ Ruys, *op.cit.*, hlm. 71-75.